

**MEDIA SOSIAL DALAM TRANSFORMASI POLITIK (STUDI KASUS PEMILIHAN
LEGISLATIF DAERAH PEMILIHAN 4 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024)**

Muh. Zulfadly MJ¹, Ahmad Mustanir², Abdul Jabbar³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: sulfadli257@gmail.com

Email: ahmadmustanir74@gmail.com; jbr.nyonk1@umsrappang.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze social media in political transformation (Case study of the legislative election for electoral district 4 of Sidenreng Rappang Regency in 2024). The research method used is a qualitative descriptive research method. Data sources are taken from observation, interviews and documentation. Data collection was carried out through in-depth interviews with legislative members of electoral district 4 of Sidenreng Rappang Regency. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data obtained were then processed using Nvivo 12 plus. The results of the study show that the role of social media in political transformation towards the legislative election for electoral district 4 in 2024, namely participation, openness, conversation, and interconnectedness. We can see that the indicators of interconnectedness and openness show the highest presentation of the four indicators which are then followed by participation and conversation. The use of social media in increasing the electability of a legislative candidate is indeed quite significant, the use of social media is a place for public information to get to know a candidate. As stated by 5 informants, social media has benefits for disseminating information to the public about their vision and mission so that it can be known by the public.

Keywords: Social Media, Political Transformation, Legislative

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis media sosial dalam transformasi politik (Studi kasus pemilihan legislatif daerah pemilihan 4 Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diambil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada anggota legislatif dapil 4 kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media sosial dalam transformasi politik terhadap pemilihan legislatif dapil 4 tahun 2024, yaitu partisipasi, keterbukaan, percakapan, dan saling terhubung. Dapat kita lihat bahwa indikator saling terhubung dan keterbukaan menunjukkan presentasi tertinggi dari keempat indikator yang kemudian disusul oleh partisipasi dan percakapan. Penggunaan media sosial dalam meningkatkan elektabilitas seorang calon anggota legislatif memang cukup signifikan, penggunaan media sosial menjadi wadah informasi masyarakat untuk mengenal seorang calon. Seperti yang dituturkan oleh 5 orang informan mengatakan bahwa media sosial memiliki manfaat untuk menyebarkan informasi bagi masyarakat mengenai visi dan misi mereka agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Kata Kunci: Media Sosial, Transformasi Politik, Legislatif

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi pada era digital telah menggeser peran media konvensional. Hal ini terjadi terutama bersamaan dengan hadirnya media baru (new media) atau dalam istilah yang lain media digital. Media baru menjadi salah satu sarana yang dapat memadukan teks, suara, gambar, dan video dengan menggunakan teknologi komputer yang berbeda dari media konvensional. Media baru merupakan terminologi yang menjelaskan mengenai teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi dan terhubung ke dalam jaringan internet. Media baru memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat merubah pola kehidupan mereka baik dalam aspek budaya, berpikir, dan berkomunikasi. Internet menjadi penyokong utama kelahiran media baru dan ini juga berdampak pada terciptanya bentuk baru interaksi sosial kegiatan komunikasi manusia (Muzahid Akbar Hayat et al., 2021) (Putra Perssela et al., 2022).

Bentuk baru kegiatan berkomunikasi masyarakat bisa dilihat dari intensnya penggunaan media sosial sebagai salah satu bentuk produk dari media baru. Sebuah penelitian yang dilakukan Nasrullah pada tahun 2015 menyebutkan bahwa dari 62 juta lebih pengguna internet di Indonesia, sekitar 38 juta orang terdaftar serta memiliki akun di media sosial Facebook. Para pengguna media sosial dapat dengan mudah bergabung dalam beberapa aktivitas dan interaksi seperti terjadinya kegiatan pertukaran informasi.

Terlebih lagi dewasa ini hadir beberapa media sosial yang sering digunakan seperti, Youtube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Media sosial ini membuat masyarakat menjadi aktif berselancar di dunia maya tanpa ada batasan ruang dan waktu. Media sosial juga dapat menjadi wadah bagi pengguna dalam menampung aspirasi dan kreatifitas. Media sosial memungkinkan akan terjadinya interaksi brand conversation, brand mention, dan sosial metric lainnya berupa follower, like dan share. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang besar dalam keputusan pembelian.

Media sosial yang banyak digunakan kalangan milenial menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan, di antaranya kasus bullying, prostitusi online, pornografi serta konflik politik dalam mendukung kandidat pilkada dan pemilu yang akan datang di tahun 2024. Adanya permasalahan yang sering muncul dalam penelitian ini adalah pentingnya mengantisipasi penyelenggaraan pelatihan literasi media di kalangan milenial. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan baik pemahaman kritis maupun partisipasi aktif sehingga memungkinkan anak muda sebagai konsumen media membuat tafsiran dan penilaian berdasarkan informasi yang diperolehnya, selain itu memungkinkan anak muda untuk menjadi prosedur media dengan caranya sendiri sehingga menjadi partisipan yang berdaya di masyarakatnya. Masyarakat sebagai pengguna media sosial perlu diberikan sisi edukasi berkaitan dengan etika serta aturan dalam penggunaan media sosial. Proses validasi media, baik itu media cetak, elektronik bahkan media sosial yang berbasis internet, harus dianalisis melalui proses pencarian informasi dari beragam sumber dan validasi bertujuan untuk mencari keseimbangan informasi yang didapatkan. Pemahaman akan dampak buruknya literasi digital perlu ditekankan pada pengguna agar tidak terjadi hal-hal yang tidak. Tren menunjukkan bahwa mayoritas pengguna media sosial kalangan peserta didik adalah anak-anak dan remaja (Mulyono, 2021).

Dinamika penggunaan media sosial saat ini digunakan tidak maksimal dan terjadinya pembiasan berita yang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini seharusnya menjadikan bagaimana kalangan milenial dan masyarakat menjadi melek politik bagi perkembangan kehidupan sosial. Begitu pesatnya perkembangan media sosial di Indonesia, maka setiap tahun selalu terjadi peningkatan. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan secara umum pengguna internet di seluruh dunia baik mobile maupun fixed mengalami kenaikan terus menerus. Demikian pula Indonesia pada tahun 2020, total pengguna internet mencapai lebih dari 196 juta jiwa atau total 72 % dari total penduduk. APJII juga melansir bagaimana perilaku pengguna internet yang berhubungan dengan kegiatan berpolitik yakni sebanyak 75,6% setuju media sosial digunakan untuk aktivitas

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

berpolitik. Berdasarkan gambaran di atas terlihat bagaimana aktivitas media sosial dapat digunakan sebagai sarana berpolitik. Sekarang ini banyak juga tokoh politik yang memiliki akun media sosial baik facebook, twitter dan instagram begitu juga partai politik. Digunakannya media sosial sebagai sarana berpolitik tentu dapat memberikan peranan bagi pengembangan literasi politik masyarakat (Saputra & Erowati, 2021).

Penggunaan media sosial untuk kepentingan kegiatan politik dapat dilakukan oleh masyarakat khususnya kaum millennial sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang kegiatan politik yang terjadi, melihat jalannya kegiatan politik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Pengembangan literasi politik yang baik menjadi vital keberadaannya dalam konteks pembangunan kualitas hidup secara demokratis dalam berbangsa dan bernegara. Pengembangan literasi politik melalui struktur pembentukan dan pengembangan sosialisasi dan edukasi yang memadai dalam konteks sosial politik maka warga negara secara komprehensif akan memahami kedudukannya sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hal tersebut akan berdampak terhadap timbulnya kesadaran yang otonom dalam partisipasi pembangunan politik dan demokrasi yang bermutu khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Beberapa penelitian terdahulu hanya menjelaskan tentang peran media saja di dunia politik bukan tentang strategi komunikasinya seperti penelitian yang dilakukan. Lainnya, penelitian yang dilakukan (Manan, 2019) Politik di Era Media Sosial hanya menjelaskan peluang media sosial oleh aktor politik. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan (Manan, 2019) dengan judul —Sosial Media sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia yang hanya menjelaskan bahwa media sosial hanya sebagai platform untuk berinteraksi tanpa adanya strategi komunikasi politik.

Pada kenyataannya saat ini media sosial hanya sekedar platform interaksi saja atau sebatas untuk mendapatkan like (suka) atau komentar yang kadang hanya sekedar komentarkomentar biasa saja. Untuk itu seharusnya media sosial memiliki fungsi sebagai alat komunikasi pada konstituen dan masyarakat luas untuk membangun kedekatan emosional serta fungsi sebagai wadah aspirasi rakyat. Selain itu media sosial seharusnya digunakan untuk membentuk atau menciptakan brand atau citra partai politik dan juga kader partai politik.

Pemilihan Legislatif merupakan momen krusial dalam kehidupan demokrasi suatu negara, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih wakilnya dalam lembaga legislatif. Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia, tidak luput dari dinamika politik yang terus berkembang.

Pada era digital saat ini, kampanye politik tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik dan papan reklame konvensional. Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Sidenreng Rappang menyaksikan pergeseran signifikan menuju penggunaan intensif media sosial dan platform online sebagai alat utama untuk berkomunikasi dengan pemilih. Fenomena kampanye online mencakup berbagai aspek, termasuk strategi digital, interaksi langsung dengan pemilih, dan dampak media sosial terhadap opini publik.

Peran media sosial dalam dunia politik telah menjadi semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan individu dan kelompok untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Dalam konteks politik, media sosial telah memberikan dampak yang besar pada proses politik dan partisipasi masyarakat dalam berbagai cara (Krina Loina Lalolo & dan Munawaroh Zainal, 2018) (Khalyubi et al., 2021).

Media sosial telah meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. Sehingga media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi politik, mengorganisir gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam cara politik dijalankan, terutama dengan munculnya media sosial sebagai salah satu kekuatan utama dalam membentuk opini

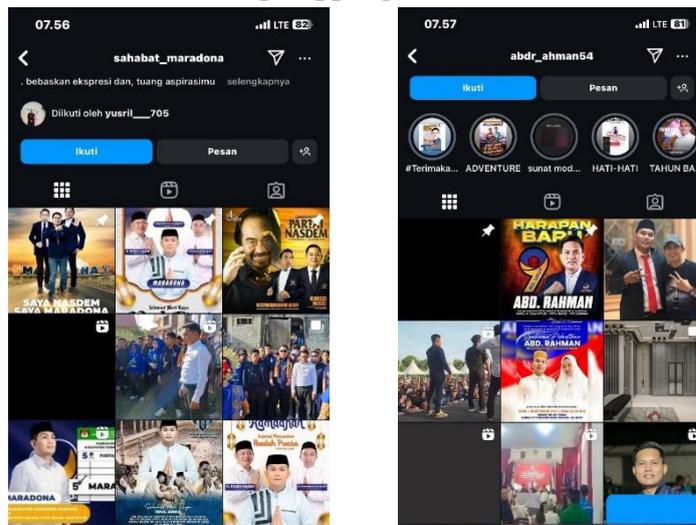
Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

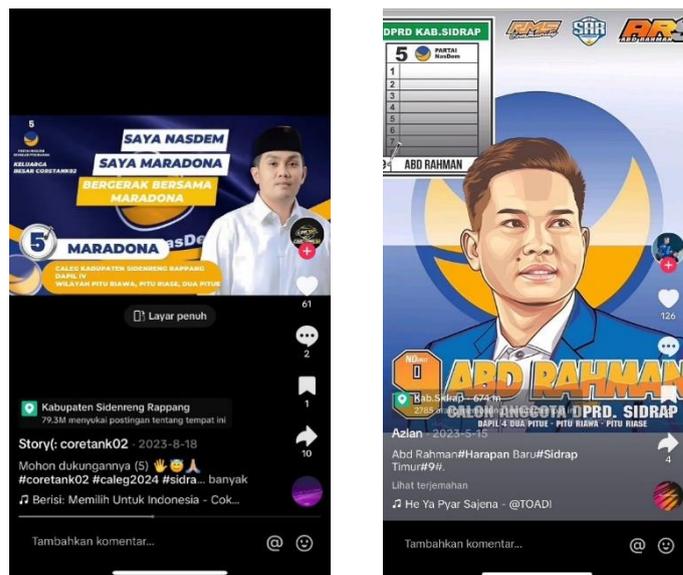
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

publik (Harahap, 2020) (Atmojo & Pratiwi, 2021). Media sosial tidak hanya menjadi wadah untuk berinteraksi secara sosial, tetapi juga telah menjadi sarana yang efektif untuk menginformasikan, memobilisasi, dan menggerakkan massa dalam dunia politik. Media sosial yang di maksud adalah media seperti facebook, tiktok, instagram dan whatsapp. Media sosial tersebut yang paling banyak di gunakan sebagai media sosialisasi dan komunikasi publik para peserta pemilihan legislatif dapil 4 di kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar 1: Penggunaan Media Sosial (Facebook Dan Instagram) Sebagai Media Sosialisasi Dan Komunikasi Publik Pada Pemilihan Legislatif Dapil 4 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024



Gambar 2: Penggunaan Media Sosial (Tiktok) Sebagai Media Sosialisasi dan Komunikasi Publik Pada Pemilihan Legislatif Dapil 4 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024



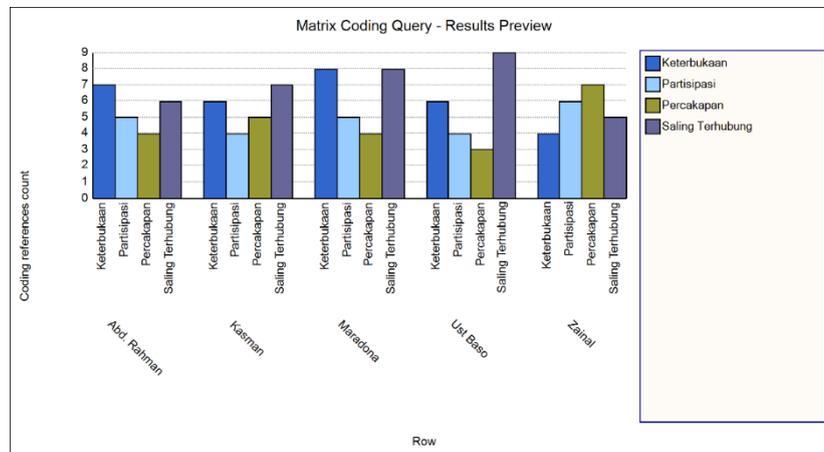
Pada pemilihan legislatif dapil 4 kabupaten Sidrap tahun 2024 telah nampak dengan jelas begitu banyaknya calon anggota legislatif yang menggunakan media sosial sebagai media kampanye dan juga banyaknya yang menjadikan media sosial sebagai media yang di gunakan untuk menggiring opini publik pada pemilihan legislatif dapil 4 kabupaten Sidrap tahun 2024. Sidrap ini juga memunculkan sebuah fenomena dimana calon anggota legislatif kabupaten Sidrap tahun 2024 memunculkan figur baru yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan legislatif 2024 berdasarkan observasi calon peneliti melihat calon anggota legislatif yang terpilih dan memperoleh suara terbanyak pada pemilihan legislatif 2024 ini memperoleh suara terbanyak di kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 5 (lima) orang yakni anggota Legislatif dapil 4 Sidenreng Rappang. Identifikasi informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Penggunaan purposive sampling harus konsisten dengan tujuan penelitian berdasarkan tipe partisipan yang sesuai dengan keinginan peneliti untuk keperluan penelitian, menggunakan purposive sampling peneliti harus mengidentifikasi dan memilih informasi informan yang mengetahui dan pahami fokus terkait dengan fenomena yang diteliti. Kriteria yang dimaksud adalah anggota Legislatif dapil 4 Sidenreng Rappang. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian dokumen. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus.

PEMBAHASAN

Gambar 3: Diagram Validasi Informan, Media Sosial



Sumber :Hasil Analisis Nvivo 12 plus, 2024

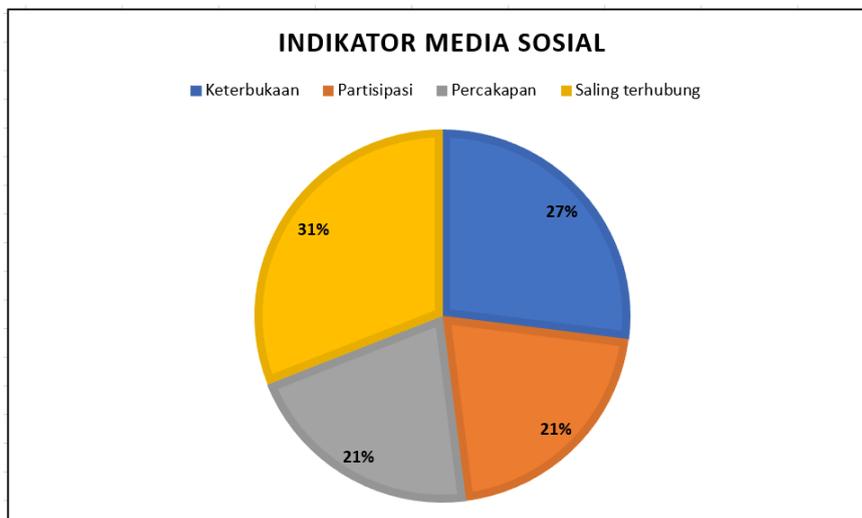
Hasil analisis dari media sosial terlihat jelas bahwa saling terhubung dan keterbukaan menunjukkan presentasi tertinggi dari keempat indikator yang kemudian disusul oleh partisipasi dan percakapan yang sudah cukup baik.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Gambar 4: Diagram Validasi Indikator, Media Sosial



Sumber: Microsoft excel

Dari indikator media sosial terlihat jelas saling terhubung menjadi indikator yang paling dominan dari informan dalam media sosial dalam transformasi politik (studi kasus pemilihan legislatif daerah pemilihan 4 kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dengan persentase mencapai 31%, keterbukaan memiliki persentase keseluruhan mencapai 27%, sedangkan indikator yang memiliki persentase terendah yaitu partisipasi dan percakapan dengan persentase 21%.

Berdasarkan Mayfield 2008 media sosial mempunyai empat indikator yakni saling terhubung, keterbukaan, partisipasi dan percakapan. Hasil analisis media sosial dalam transformasi politik (studi kasus pemilihan legislatif daerah pemilihan 4 kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

1. Saling terhubung

Saling terhubung melalui media sosial telah menjadi elemen yang sangat penting dalam transformasi politik modern, mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan kekuasaan dan proses demokrasi. Di era digital, media sosial bukan hanya menjadi platform untuk berbagi informasi pribadi, tetapi juga sarana utama bagi warganet untuk terlibat dalam diskursus politik. Dengan kemampuannya untuk menghubungkan jutaan orang dalam hitungan detik, media sosial telah meruntuhkan batasan geografis dan sosial yang sebelumnya menghalangi komunikasi politik. Rakyat kini memiliki akses langsung terhadap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik, serta dapat memberikan respons atau kritik secara real-time.

Selain itu, media sosial juga memfasilitasi terjadinya gerakan sosial yang cepat dan terorganisir, di mana isu-isu penting dapat mencuat dan mendapatkan perhatian global dalam waktu singkat. Transformasi ini mempercepat lahirnya bentuk-bentuk baru dari aktivisme politik, yang tidak lagi terbatas pada organisasi formal atau lembaga tradisional. Sebagai contoh, gerakan seperti Arab Spring atau protes-protes besar lainnya menunjukkan bagaimana media sosial menjadi instrumen untuk mobilisasi massa, menyatukan individu dengan berbagai latar belakang dalam tujuan bersama.

Namun, meskipun saling terhubung melalui media sosial memberikan potensi besar bagi perubahan politik yang lebih inklusif dan transparan, tantangan baru pun muncul, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi sosial, dan manipulasi opini publik. Oleh karena itu, keterhubungan ini

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

perlu disikapi dengan kesadaran kritis untuk memastikan bahwa media sosial benar-benar menjadi alat yang mendukung transformasi politik yang positif, bukan justru merusak kualitas demokrasi itu sendiri.

Saling terhubung melalui media sosial juga membuka ruang bagi lebih banyak individu untuk mengakses dan menyebarkan perspektif yang sebelumnya mungkin terabaikan atau tidak terwakili dalam media mainstream. Ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam membentuk opini publik, mempengaruhi kebijakan, dan menyuarakan tuntutan perubahan. Melalui fitur-fitur seperti hashtag, video viral, atau live streaming, isu-isu yang tidak mendapat perhatian media tradisional dapat dengan cepat menjadi sorotan global. Ini memperlihatkan bagaimana media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai katalisator untuk perubahan sosial dan politik yang lebih besar. Selain itu, fenomena "demokrasi digital" ini juga memicu munculnya ruang-ruang baru untuk dialog antarwarga negara dan antarnegara, yang dapat mengurangi kesenjangan antara pemangku kepentingan politik dan masyarakat biasa.

Dampak positif ini datang dengan sejumlah tantangan. Saling terhubung dalam dunia maya tidak selalu menjamin terciptanya diskursus yang sehat atau berbobot. Meskipun media sosial menawarkan kebebasan berbicara, ia juga rentan terhadap polarisasi dan fragmentasi sosial, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan politik tertentu dapat terjebak dalam "echo chambers", ruang yang memperkuat pandangan mereka sendiri tanpa adanya interaksi dengan pandangan yang berbeda. Hal ini dapat memperburuk perpecahan sosial, menciptakan ketegangan politik, dan memperlemah kohesi sosial. Selain itu, disinformasi dan propaganda juga seringkali tersebar dengan cepat melalui platform-platform ini, mempengaruhi opini publik dan merusak kepercayaan terhadap institusi politik. Oleh karena itu, agar saling terhubung melalui media sosial dapat menjadi kekuatan positif dalam transformasi politik, dibutuhkan literasi digital yang baik di kalangan masyarakat, serta regulasi yang bijak dari pemerintah dan platform media sosial untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Dengan cara ini, media sosial bisa menjadi alat yang memperkuat demokrasi, mendukung transparansi, dan menciptakan ruang politik yang lebih inklusif dan partisipatif.

2. Keterbukaan

Keterbukaan dalam media sosial telah memainkan peran penting dalam transformasi politik global, terutama dalam menciptakan ruang bagi diskursus publik yang lebih bebas dan inklusif. Sebelumnya, proses politik sering kali didominasi oleh pihak-pihak tertentu, seperti media mainstream atau elit politik yang memiliki kendali atas narasi yang berkembang. Namun, dengan kemunculan platform media sosial, masyarakat memiliki akses langsung untuk berpartisipasi dalam percakapan politik, menyuarakan pendapat, dan berinteraksi dengan politisi serta pihak-pihak terkait tanpa batasan geografis atau hierarkis.

Keterbukaan ini memungkinkan munculnya berbagai perspektif yang sebelumnya mungkin terpinggirkan, sekaligus mempermudah mobilisasi massa untuk tujuan tertentu, seperti dalam gerakan protes atau kampanye politik. Namun, keterbukaan ini juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang salah (misinformasi), polarisasi ideologi yang semakin tajam, dan manipulasi opini publik melalui algoritma yang cenderung mengutamakan konten yang sensasional. Meski demikian, keterbukaan dalam media sosial tetap berpotensi besar dalam mendemokratisasi politik, dengan memungkinkan wacana politik yang lebih terbuka, akses yang lebih merata terhadap informasi, dan ruang bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, transformasi politik yang dipicu oleh media sosial adalah kombinasi dari peluang untuk memperkuat partisipasi publik dan tantangan untuk mengelola dampak-dampaknya secara bijaksana.

Keterbukaan media sosial dalam transformasi politik juga menciptakan tantangan baru terkait

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

regulasi dan kontrol. Pemerintah dan badan-badan internasional kini dihadapkan pada dilema antara menjaga kebebasan berpendapat dan mengatur penyebaran informasi agar tidak merugikan kepentingan publik. Di satu sisi, media sosial memberi ruang bagi suara-suara alternatif dan memperluas akses informasi politik yang lebih beragam, tetapi di sisi lain, informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan propaganda dapat dengan cepat menyebar, memperburuk polarisasi sosial dan merusak integritas proses politik. Di banyak negara, fenomena ini telah mendorong debat tentang perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital, namun sering kali regulasi semacam ini juga bisa disalahgunakan untuk membungkam oposisi atau membatasi kebebasan berekspresi.

3. Partisipasi

Partisipasi dalam media sosial telah menjadi salah satu elemen kunci dalam transformasi politik modern, membuka akses yang lebih luas bagi individu untuk terlibat langsung dalam proses politik, baik dalam bentuk diskusi, aktivisme, maupun kampanye. Sebelumnya, partisipasi politik terbatas pada ruang-ruang formal seperti pemilu, organisasi politik, atau pertemuan tatap muka yang terkadang memerlukan sumber daya dan akses yang tidak merata. Namun, dengan hadirnya media sosial, siapa pun dengan koneksi internet kini dapat menyuarakan pendapatnya, mengorganisir aksi, bahkan mempengaruhi kebijakan publik. Media sosial telah mengubah cara orang berinteraksi dengan politik; dari yang semula pasif menjadi lebih aktif, mendorong demokratisasi partisipasi. Melalui platform seperti Twitter, Facebook, atau TikTok, individu dan kelompok dapat berbagi informasi, mendiskusikan isu-isu penting, serta memperjuangkan perubahan sosial dengan lebih cepat dan efisien. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai gerakan sosial seperti Arab Spring, gerakan #MeToo, dan protes-protes politik di berbagai negara, di mana media sosial menjadi alat vital untuk mobilisasi massa dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang dianggap tidak responsif atau represif.

Namun, meskipun media sosial memberikan ruang yang lebih terbuka bagi partisipasi politik, ia juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal kualitas partisipasi tersebut. Meskipun banyak orang yang dapat berpartisipasi, partisipasi mereka tidak selalu berujung pada pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik atau pada tindakan yang berkelanjutan. Banyak diskusi yang terjadi di media sosial cenderung bersifat emosional atau impulsif, dan tidak jarang muncul fenomena "slacktivism", yaitu bentuk partisipasi yang minimal namun terlihat aktif, seperti hanya menekan tombol "like" atau membagikan postingan tanpa benar-benar terlibat dalam aksi nyata. Selain itu, media sosial juga dapat memperburuk polarisasi, dengan menciptakan "echo chambers" di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, sehingga mempersempit perspektif dan menurunkan kualitas debat publik. Dalam beberapa kasus, partisipasi di media sosial bahkan dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memanipulasi opini publik, menyebarkan disinformasi, atau menciptakan polarisasi yang lebih tajam dengan memanfaatkan algoritma yang mendahulukan konten sensasional.

Partisipasi dalam media sosial juga mendorong munculnya model-model baru dalam kampanye politik. Kampanye yang dulunya mengandalkan media massa tradisional kini dapat dilakukan secara lebih langsung dan personal melalui media sosial. Calon-calon pemimpin politik dan partai-partai politik menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pemilih, mengumpulkan dana kampanye, serta membentuk citra politik mereka. Hal ini membuka peluang baru bagi kandidat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke saluran politik konvensional. Namun, pendekatan ini juga membawa tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, terutama ketika kampanye menggunakan data pribadi pemilih untuk mempersonalisasi pesan politik dan memanipulasi opini publik secara halus. Dengan demikian, meskipun media sosial memperluas ruang bagi partisipasi politik, ia juga memerlukan pemikiran kritis dan regulasi yang cermat untuk memastikan bahwa

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

partisipasi tersebut benar-benar membawa dampak positif bagi proses demokrasi dan bukan sekadar menjadi ajang manipulasi dan polarisasi.

Partisipasi dalam media sosial memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transformasi politik, dengan memperkenalkan model interaksi politik yang lebih inklusif dan dinamis. Namun, partisipasi ini juga memerlukan kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif yang bisa ditimbulkan.

4. Percakapan

Percakapan di media sosial telah menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi politik, menciptakan ruang yang lebih luas untuk diskursus politik yang melibatkan berbagai pihak secara langsung dan tanpa batasan. Sebelumnya, percakapan politik banyak dikendalikan oleh media mainstream dan institusi politik yang memiliki akses ke platform yang lebih terbatas, seperti televisi atau surat kabar. Namun, media sosial mengubah dinamika ini dengan memberikan kesempatan bagi siapa saja baik individu, kelompok, atau bahkan pemerintah untuk berpartisipasi dalam percakapan publik, berbagi pandangan, dan memperdebatkan isu-isu penting secara lebih terbuka dan egaliter. Di platform seperti Twitter, Facebook, dan YouTube, percakapan politik sering kali berkembang dengan cepat dan dinamis, melibatkan masyarakat dalam berbagai bentuk, dari debat ideologis hingga reaksi spontan terhadap peristiwa politik terkini. Percakapan ini tidak hanya terbatas pada kalangan elit atau politisi, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan atau sulit mengakses saluran politik tradisional, seperti kelompok minoritas, aktivis, atau generasi muda.

Meskipun percakapan politik di media sosial dapat memperkaya wacana publik, ia juga menimbulkan sejumlah tantangan terkait kualitas dan dampaknya. Salah satu isu utama yang muncul adalah kecenderungan media sosial untuk memperkuat polarisasi ideologis, di mana percakapan politik sering kali terfragmentasi dalam "bubble" atau ruang lingkup yang tertutup, di mana individu hanya berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan serupa. Hal ini menyebabkan terbatasnya dialog yang produktif dan mengarah pada semakin kuatnya gesekan antara kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda. Selain itu, algoritma yang digunakan oleh banyak platform media sosial cenderung memprioritaskan konten yang lebih sensasional atau emosional, sehingga memperburuk kualitas percakapan yang lebih rasional dan berbasis fakta. Ini sering kali menciptakan lingkungan di mana opini dan perasaan lebih dihargai daripada informasi yang objektif, mengarah pada distorsi pemahaman publik terhadap isu-isu politik yang kompleks.

Percakapan media sosial juga memfasilitasi keterlibatan politik yang lebih cepat dan reaktif. Isu-isu politik dapat viral dalam hitungan jam, mengundang perhatian publik, dan mendorong perubahan opini politik dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, berbagai gerakan sosial atau protes dapat berkembang dari percakapan di media sosial, yang kemudian diikuti dengan aksi nyata di dunia fisik, seperti yang terlihat pada gerakan #BlackLivesMatter atau protes-protes demokrasi di Hong Kong. Media sosial memungkinkan individu untuk berbicara secara langsung dengan pembuat kebijakan atau politisi, serta saling berbagi ide untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Dengan kata lain, percakapan di media sosial telah mendorong terciptanya bentuk demokrasi yang lebih partisipatif, di mana warga negara bisa lebih terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Keberagaman percakapan ini juga membawa risiko manipulasi dan disinformasi. Informasi palsu atau hoaks bisa dengan mudah tersebar di media sosial, memperburuk narasi-narasi politik tertentu dan menciptakan ketegangan yang tak terkendali. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan propaganda politik sering kali sulit dibedakan dari fakta, sehingga menambah kerumitan dalam memahami kebenaran. Untuk itu, penting adanya literasi media yang lebih baik di kalangan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

pengguna media sosial agar mereka bisa lebih kritis dalam menilai informasi yang beredar, sekaligus mendorong platform untuk bertanggung jawab dalam mengawasi konten yang tersebar di ruang publik digital.

Percakapan di media sosial telah memicu transformasi besar dalam cara kita berinteraksi dengan politik. Ia membuka ruang baru bagi partisipasi dan ekspresi politik, memungkinkan terjadinya dialog yang lebih inklusif dan memperkaya wacana publik. Namun, agar percakapan ini dapat membawa dampak positif yang berkelanjutan, diperlukan upaya untuk menjaga kualitas informasi yang beredar, mencegah polarisasi yang berlebihan, dan mengatasi tantangan manipulasi yang dapat merusak integritas percakapan politik itu sendiri. Dengan demikian, percakapan di media sosial bukan hanya tentang kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang tanggung jawab kolektif dalam menciptakan ruang diskusi politik yang sehat dan konstruktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti peran media sosial dalam transformasi politik terhadap pemilihan legislatif dapil 4 tahun 2024, yaitu Partisipasi, Keterbukaan, Percakapan, dan Saling Terhubung. Penggunaan media sosial dalam meningkatkan elektabilitas seorang calon anggota legislatif memang cukup signifikan, penggunaan media sosial menjadi wadah informasi masyarakat untuk mengenal seorang calon. Seperti yang dituturkan oleh 5 orang informan mengatakan bahwa media sosial memiliki manfaat untuk menyebarkan informasi bagi masyarakat mengenai visi dan misi mereka agar dapat diketahui oleh masyarakat.

REFERENSI

- Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2021). Media Sosial Twitter sebagai Platform Media Informasi Digital dalam Penerapan New Normal. In *Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal* (Vol. 1, Issue November).
- Harahap, I. H. (2020). Kampanye Pilpres 2019 Melalui Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi Indonesia. *Komunikologi*, 17(1), 1.
- Khalyubi, W., Bangun, C. D., Ardiyansyah, F., & Romadhona, M. R. (2021). Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Kampanye dan Partisipasi Digital dalam Pilkada Kota Depok Tahun 2020. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 87–102. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i2.241>
- Krina Loina Lalolo, P., & dan Munawaroh Zainal. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 737–753. <http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/210/141>
- Mulyono, F. (2021). Dampak Media Sosial bagi Remaja. *Jurnal Simki Economic*, 4(1), 57–65. <https://doi.org/10.29407/jse.v4i1.66>
- Muzahid Akbar Hayat, Sjaiful Jayadiningrat, Gunawan Wibisono, & Muhammad Iwu Iyansyah. (2021). Peran Media Sosial Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(1), 104–114. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i1.61>
- Putra Perssela, R., Mahendra, R., & Rahmadiani, W. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 2(3), 650–656. <https://doi.org/10.36085/jimakukerta.v2i3.4525>
- Saputra, N. A., & Erowati, D. (2021). Pengaruh Peran Kampanye Media Sosial Terhadap Perilaku Pemilih Muda Di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 845–852. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.413>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id